

KEWAJIBAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE-19* (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Muhammad Hafiz Aini

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah menyebarkan secara global termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 bahkan telah dinyatakan sebagai status kedaruratan kesehatan nasional di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah vaksinasi. Program vaksinasi COVID-19 bertujuan membentuk *herd immunity*. Pembentukan *herd immunity* membutuhkan sekitar 70% penduduk Indonesia untuk divaksin dan ditargetkan tercapai pada tahun 2022. Namun vaksinasi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat timbul, bahkan ada kelompok masyarakat menolak untuk divaksin. Kelompok masyarakat ini merasa kewajiban vaksinasi melanggar hak asasi serta keraguan terhadap kualitas vaksin. Pemerintah mengambil kebijakan untuk mewajibkan vaksinasi dengan ancaman sanksi administratif dan pidana yang berbeda dengan pendekatan WHO dan Negara lain. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan normative dan pendekatan konseptual. Data penelitian menggunakan data sekunder dari literatur baik bahan hukum maupun non hukum yang berhubungan dengan vaksinasi covid di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi merupakan kebijakan yang sangat penting dalam pengendalian COVID-19. Kewajiban vaksinasi harus dilakukan demi yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai konstitusi di Indonesia. Vaksinasi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus diakomodir dan dilaksanakan.

Namun dalam pelaksanaannya mengalami kendala dengan adanya keraguan dan penolakan pada vaksin. Kewajiban ini berdasarkan pada hukum darurat negara, utilitasme, dan undang-undang yang berlaku. Kewajiban tersebut menyebabkan restriksi beberapa hak asasi. Namun penolakan vaksinasi memiliki juga potensi pelanggaran HAM karena dapat membahayakan orang lain dan negara. Pemberian sanksi baik administratif dan pidana seyogyanya menjadi *ultimum remedium*. Pendekatan persuasif dan promotif serta sosialisasi harus menjadi pendekatan awal. Namun regulasi kewajiban vaksinasi memiliki kekurangan mulai dari kesalahan prosedur pembuatan hukum hingga tidak adanya peraturan khusus mengenai pandemi COVID-19. Peraturan darurat ini, minimal setingkat PERPPU, yang khusus mengatur pandemi COVID-19 harus dimiliki karena pada situasi yang darurat/abnormal. Serta kewajiban vaksinasi kepada warga negara berimplikasi juga pada negara untuk wajib menjadi pelaksanaan vaksinasi. Pemerintah berkewajiban menjalankan program vaksinasi dengan memastikan ketersediaan, akses, penerimaan, dan kualitas COVID-19.

Kata kunci: covid-19, kewajiban, vaksinasi

MANDATORY CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) VACCINATION IN INDONESIA: LEGAL ASPECT

Muhammad Hafiz Aini

ABSTRACT

COVID-19 pandemic has spread globally and has reached a dangerous point. COVID-19 pandemic has even been declared a national health emergency in Indonesia. Various efforts have been made to overcome the Covid-19 pandemic, one of which is vaccination. The COVID-19 vaccination aims to establish herd immunity. Herd immunity requires about 70% of the population to be vaccinated. However, the vaccination raises pros and cons in the community. There are even groups of people who refuse to be vaccinated. This community group feels that mandatory vaccination violates human rights and doubts about the quality of the vaccine. The Government has taken a policy to mandate vaccination with administrative and criminal sanctions that are different from the approach of WHO and other countries. This research is a normative study with a conceptual and a normative approach analysis. Data uses secondary data from the literature, both legal and non-legal materials related to covid vaccination. The results show that vaccination is a very important policy in COVID-19 countermeasures. Mandatory vaccination must be carried out to protect all citizens according to the Indonesian constitution. Vaccination is also part of human rights that must be accommodated and implemented. However, in its implementation, there are problems with doubts and rejection of the vaccine. This obligation causes the restriction of several human rights.

However, refusal to vaccinate can violate human rights because it can harm other people and the nation. Therefore, the provision of both administrative and criminal sanctions should be the *ultimum remedium*. A persuasive and promotive approach and socialization should be the initial approach. However, the regulation of vaccination obligations has shortcomings ranging from the potential for errors in law-making procedures to the absence of an emergency regulation. This regulation, in form of Government Regulation in lie of Law, specifically for COVID-19 pandemic is a must-have due to an abnormal situation. And the obligation to vaccinate citizens also has implications for the state to be obliged to carry out vaccinations. The Government is obliged to run a vaccination program by ensuring the availability, access, acceptance, and quality of COVID-19 vaccination.

Keywords: covid-19, mandatory, vaccination